
Research Article

Apakah Dana Desa dan Fungsi Belanja APBD Mampu Mengatasi Kemiskinan di Indonesia?

Pardomuan Robinson Sihombing¹, Dwi Muslianti², Yunita³

BPS-Statistics Indonesia

Article history:

Submission September 2022

Revised September 2022

Accepted September 2022

*Corresponding author:

E-mail:

robinson@bps.go.id

ABSTRACT

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi. Berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah untuk mengurangi persentase kemiskinan, di antaranya melalui pengeluaran belanja daerah dan dana desa. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana pengaruh dana desa dan fungsi belanja APBD terhadap persentase kemiskinan di Indonesia. Adapun pendekatan belanja APBD menggunakan variabel fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan sosial, fungsi perumahan dan fasilitas umum. Data bersumber dari Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik periode 2018-2021. Adapun metode statistik yang digunakan yaitu regresi dengan data panel. Berdasarkan pengujian model panel, model efek tetap (*fixed effect*) merupakan model yang terbaik. Secara simultan seluruh variabel berpengaruh terhadap kemiskinan. Secara parsial variabel Fungsi Pendidikan, Fungsi Perlindungan Sosial, Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dan Dana Desa berpengaruh signifikan negatif terhadap persentase kemiskinan. Di sisi lain belum cukup bukti menyatakan Fungsi Ekonomi berpengaruh terhadap persentase kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan kebijakan komprehensif terkait ekonomi makro-sosial agar tingkat kemiskinan Indonesia terus berkurang misalnya dengan memberikan bantuan yang bersifat produktif pada masyarakat.

Keywords: *dana desa, ekonomi, kemiskinan, pendidikan, sosial*

Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi topik yang selalu menarik untuk dibahas karena merupakan salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi selain pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan pengangguran. Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar

makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Seorang penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (BPS, 2021).

Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Salah satu cara adalah melalui belanja negara

How to cite:

Sihombing, P. R., Dwi Muslianti, & Yunita (2022). Apakah Dana Desa dan Fungsi Belanja APBD Mampu Mengatasi Kemiskinan di Indonesia?. *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*. 2 (2), 236 – 243. doi: 10.11594/jesi.02.02.12

yang dikeluarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah. Syamsuri & Bandiyono (2018) meneliti tentang Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). Hasil yang didapat beberapa fungsi belanja berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan, hal ini berarti peningkatan fungsi belanja akan menurunkan persentase kemiskinan. Selain itu, Nurainah (2019) menganalisis Pengaruh Kesempatan Kerja, Belanja Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil yang didapat belanja bantuan sosial berpengaruh terhadap kemiskinan.

Usaha lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan dana bantuan berupa dana desa. Pemerintah melalui amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sejak tahun 2015 pertama kalinya Indonesia mengucurkan Dana Desa. Dengan adanya dana desa ini diharapkan agar dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Sunu dan Utama (2019) meneliti Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat

kemiskinan, hal ini berarti peningkatan dana desa akan mengurangi persentase kemiskinan. Lebih lanjut Sigit dan Kosasih, (2020) meneliti Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel Dana Desa memiliki pengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan permasalahan dan berbagai penelitian sebelumnya, dapat dilihat belum ada penelitian yang menggabungkan pengaruh dana desa dan belanja daerah terhadap kemiskinan. Penelitian ini melakukan pemodelan pengaruh fungsi belanja APBD dan dana desa terhadap persentase kemiskinan. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor fungsi belanja APBD dan dana desa yang mempengaruhi indeks ekonomi inklusif di Indonesia tahun 2018-2021.

Data dan Methodologi

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik pada Publikasi Statistik Keuangan Desa (BPS, 2022a) dan Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2018-2021 (BPS, 2022b) serta Kementerian Keuangan tahun 2018-2021. Penelitian ini berfokus pada seluruh provinsi di Indonesia dengan masa penelitian tahun 2018-2021. Adapun variabel dependen dan independen dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. Seluruh variabel independen menggunakan transformasi logaritma untuk menstandarkan satuan data menjadi persen.

Tabel1. Penelitian Variabel

Variabel Dependen	Satuan	Skala Data	Transformasi Data
Persentase Kemiskinan	Persen	Rasio	
Variabel Independen	Satuan	Skala Data	
Fungsi Ekonomi	Rupiah	Rasio	Logaritma Natural
Fungsi Pendidikan	Rupiah	Rasio	Logaritma Natural
Fungsi Perlindungan Sosial	Rupiah	Rasio	Logaritma Natural
Fungsi Perumahan dan Fasum	Rupiah	Rasio	Logaritma Natural
Dana Desa	Rupiah	Rasio	Logaritma Natural

Model regresi panel digunakan untuk menganalisis data data panel yang digunakan dalam penelitian ini. Ada tiga jenis pemodelan

dalam regresi data panel, yaitu *common/pooled model*, *fixed-effect model*, dan *random effect model* (Baltagi, 2005). Adapun prosedur

pemilihan model dilakukan untuk menentukan model terbaik yang menginformasikan hubungan antar variabel dengan menggunakan uji Chow, LM BP Test dan Hausman. Pemilihan model regresi panel terbaik dilakukan dibawah

uji dan hipotesis yang tertera pada Tabel 2. Kriteria dalam menolak hipotesis nol jika nilai probabilita lebih kecil dari alpha, dimana dalam penelitian ini nilai alpha=0.05

Tabel2. Uji Pemilihan Model Panel

Uji Model Panel	Hipotesis Nol	Hipotesis Alternatif
Tes Langrange Bresuh Pagan (BP)	Model <i>pooled/common</i> lebih baik daripada <i>Fixed</i>	Model <i>Fixed</i> lebih baik daripada Model <i>Pooled/common</i>
Tes Chow	Model <i>pooled/common</i> lebih baik daripada <i>Random</i>	Model <i>Random</i> lebih baik daripada Model <i>Pooled/common</i>
Tes Hausman	Model <i>Random</i> lebih baik daripada <i>Fixed</i>	Model <i>Fixed</i> lebih baik daripada <i>Random</i>

Setelah memilih model terbaik, pengujian asumsi klasik dilakukan. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa model dapat digunakan untuk melihat pengaruh antar variabel dan memprediksi nilai variabel dependen dari nilai yang diketahui dari variabel

independen (Gujarati, 2004). Uji asumsi klasik dapat dilihat pada Tabel 3. Kriteria dalam menolak hipotesis nol jika nilai probabilita lebih kecil dari alpha, dalam penelitian ini nilai alpha=0.05.

Tabel3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi	Hipotesis Nol	Hipotesis Alternatif
Long Run Normalitas Test	Data terdistribusi normal	Data tidak berdistribusi normal
Uji White	Varian data Homokedastis	Varian data Heterokedastis
Uji Korelasi LM	Model Non-Autokorelasi	Model Autokorelasi
Uji Linearitas Ramsey	Model Berpola Linier	Model Tidak Berpola Linier

Setelah model terbaik dipilih dan memenuhi asumsi klasik, langkah selanjutnya adalah menguji kebaikan model (Walpole, 2012). Uji kebaikan model dapat dilihat pada Tabel 4.

Setelah semua kriteria pengujian model terpenuhi, interpretasi persamaan regresi yang terbentuk dilakukan.

Tabel4. Model Goodness of Fit

Goodness of Fit Test	Hipotesis Nol	Hipotesis Alternatif	Tolak Ho
Koefisien Determinasi Uji/ adjusted R square	R square > 0,5		
Tes Simultan / Tes F	Model Tidak fit/ Semua variabel tidak berpengaruh	Model fit / minimal 1 variabel memiliki efek yang signifikan	Nilai probabilita < 0,05
Tes Parsial / Uji T	Variabel independen tertentu tidak berpengaruh	Variabel independent berpengaruh	Nilai probabilita < 0,05

Adapun model penelitian yang digunakan adalah:

$$kemiskinan = \beta_0 + \beta_1 \text{fungsi_Ekonomi} + \beta_2 \text{fungsi_Pendidikan} + \beta_3 \text{fungsi_Perlindungan_Sosial} + \beta_4 \text{fungsi_Perumahan_Fasum} + \beta_5 \text{dana_Desa} + \varepsilon$$

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Fungsi Belanja Ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan

H₂: Fungsi Belanja Kesehatan berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan

H₃: Fungsi Belanja Sosial berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan

H₄: Fungsi Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan

H₅: Dana Desa berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan

Kriteria dalam menolak hipotesis nol jika nilai probabilitas lebih kecil dari alpha, dalam penelitian ini nilai alpha=0.05. Pengaruh negatif bermakna kenaikan nilai variabel independen akan menurunkan nilai variabel dependen.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan diawali dengan menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui karakteristik masing-masing variabel penelitian selama periode penelitian. Tabel 5 menunjukkan analisis deskriptif. Rata-rata, kemiskinan di Indonesia adalah 10.6 poin. Kemiskinan tertinggi adalah 27.7 di Papua tahun 2018, dan terendah adalah 3.5 poin di Provinsi DKI tahun 2019. Dana Desa tertinggi pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, sedangkan terendah DKI Jakarta

yang tidak diberikan dana desa. Belanja APBD fungsi Pendidikan tertinggi pada Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 dan terendah pada Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021. Belanja APBD fungsi perumahan dan fasum tertinggi pada Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 dan terendah pada Provinsi Bengkulu tahun 2018. Belanja APBD fungsi perlindungan sosial tertinggi pada Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 dan terendah pada Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Tabel 5. Analisis Deskriptif

Variabel	Mean	Minimum	Maximum
Kemiskinan	10.6	3.5	27.7
Dana Desa	1,971,790,343	-	8,640,253,889
Fungsi Pendidikan	3,625,908,533,490	360,090,508,262	24,061,095,001,382
Fungsi Ekonomi	851,264,775,661	-	8,201,488,282,362
Fungsi Perlindungan Sosial	2,054,475,891,211	24,260,087,470	22,952,845,305,424
Fungsi Perumahan dan Fasum	672,819,413,773	-	10,607,631,373,097

Persyaratan dalam model regresi panel adalah tidak ada hubungan/multikolinearitas tinggi antara variabel independen, seperti yang terlihat dari nilai *Varian Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Dalam penelitian ini, semua

variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari sepuluh (Tabel 6). Ini berarti semua variabel independen yang digunakan dalam model sudah bebas asumsi multikolinearitas.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas Variabel Independen

Variabel	VIF
Fungsi Ekonomi	2.418412
Fungsi Pendidikan	3.512457
Fungsi Perlindungan Sosial	3.535468
Perumahan dan Fasilitas Umum	3.022957
Dana Desa	1.919875

Sebelum menganalisis lebih lanjut, pemilihan model regresi panel dilakukan dengan menggunakan tes yang disebutkan di bagian metodologi. Pada Tabel 7 menjelaskan hasil uji pemilihan model panel. Model efek tetap dianggap yang terbaik untuk menggambarkan

hubungan antara variabel penelitian. Hal ini dikarenakan pada uji Chow dan uji Hausman nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha=0.05$ sehingga dikatakan model *fixed* daripada model *pooled* dan *random*.

Tabel7. Uji Model Panel

Jenis Uji	Nilai Statistik Uji	Nilai Probabilita	Kesimpulan
Uji LM BP	181.03	0.00	Model <i>Random</i> lebih baik daripada Model <i>Common/ Pooled</i>
Tes Chow	966.00	0.00	Model <i>Fixed</i> lebih baik daripada Model <i>Common/ Pooled</i>
Tes Hausman	12.68	0.02	Model <i>Fixed</i> lebih baik daripada Model <i>Random</i>

Setelah model regresi panel terbaik dipilih, maka model regresi panel yang dipilih tidak ditafsirkan secara langsung tetapi diuji untuk asumsi klasik. Tes ini dimaksudkan agar model yang dipilih dapat digunakan keduanya untuk melihat efek prediksi. Asumsi yang digunakan adalah asumsi normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan linieritas. Pada Tabel 8,

asumsi normalitas, linearitas dan non heterokedastis terpenuhi. Nilai probabilita lebih besar dari $\alpha= 0,05$. Di sisi lain, masih ada pelanggaran asumsi autokorelasi. Nilai probabilitas uji autokorelasi kurang dari 0,05 sehingga tolak H_0 dan disimpulkan ada pelanggaran asumsi autokorelasi.

Tabel8. Uji Asumsi Klasik

Ujian	Nilai Uji	Nilai Probabilita	Kesimpulan
Normality Test	4.00	0.135	Normalitas
Uji White	19.16	0.510	Homokedastisitas
Korelasi Seri LM	96.49	0.000	Autokorelasi
Ramsey Test	0.64	0.886	Pola linear

Karena pelanggaran asumsi autokorelasi, *model fixed* ditransformasi menggunakan *model white crosssection* (Greene, 2018). Model

hasil transformasi dalam penyembuhan pelanggaran asumsi klasik yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel9. Uji Signifikansi Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

Dependent Variable: MISKIN Method: Panel Least Squares Sample: 2018 2021 White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)					
Variabel	Koefisien	Stdev	T statistik	Probabilitas	
C	32.00	1.5974	20.037	0.000	
Fungsi Ekonomi	-0.105	0.1090	-0.970	0.334	
Fungsi Pendidikan	-0.2137	0.0535	-3.980	0.000	
Fungsi Perlindungan Sosial	-0.100	0.0393	-2.562	0.012	
Perumahan dan Fasilitas Umum	-0.1672	0.0314	-5.32	0.000	
Dana Desa	-0.2519	0.0387	-6.49	0.000	

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.997	Adjusted R-squared	0.9962
F-statistic	928.6	Prob(F-statistic)	0.000
Durbin-Watson stat	1.665		

Dari Tabel 9 di atas, nilai koefisien determinansi sebesar 0.997301. Nilai koefisien ini berarti bahwa semua variabel independen dapat menjelaskan variasi persentase kemiskinan sebesar 99.73 persen; sisanya 0,27 persen dipengaruhi variabel lain di luar model. Pada uji F menunjukkan bahwa semua variabel independen bersama-sama mempengaruhi persentase kemiskinan. Hasil ini diidentifikasi oleh nilai probabilitas statistik $F = 0.00$ lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. Hasil ini berarti bahwa pemodelan yang dilakukan sesuai.

Dari uji parsial yang diidentifikasi dengan nilai probabilitas uji t menunjukkan semua variabel signifikan berpengaruh dimana nilai probabilitasnya sebesar $0.000 < \alpha = 0.05$. Jika dilihat dari koefisiennya semua variabel berpengaruh negatif. Persamaan regresi terbentuk:

$$\begin{aligned} \widehat{\text{Kemiskinan}} = & 32.01 - 0.105 * \text{Lfungsi_Ekonomi} \\ & - 0.213 * \text{Lfungsi_Pendidikan} - \\ & 0.1007 * \text{Lfungsi_Perlindungan_So-} \\ & \text{sial} - 0.167 * \text{Lfungsi_Pe-} \\ & \text{rumahan_Fasum} - \\ & 0.251 * \text{Ldana_Desa} \end{aligned}$$

Pembahasan

Fungsi Ekonomi belum memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap persentase kemiskinan dengan koefisien sebesar -0.105747 dengan nilai $|t \text{ stat}| = 0.970063 < t \text{ tabel} = 1,96$ dan nilai probabilitas $= 0.3345 < \alpha = 0.05$. Hal ini berarti belum cukup bukti setiap kenaikan 1 persen belanja ekonomi akan menurunkan persentase kemiskinan sebesar 0.105747 poin dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini senada dengan penelitian Putri et al., (2021) yang menyatakan belum cukup bukti bahwa belanja ekonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Apabila belanja ekonomi tidak dimanfaatkan untuk kegiatan produktif maka tidak berdampak langsung terhadap kemiskinan.

Fungsi Pendidikan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap persentase

kemiskinan dengan koefisien sebesar -0.213705 dengan nilai $|t \text{ stat}| = 3.988357 > t \text{ tabel} = 1,96$ dan nilai probabilitas $= 0.0001 < \alpha = 0.05$. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 persen belanja pendidikan akan menurunkan persentase kemiskinan sebesar 0.213705 poin dengan asumsi variabel lain konstan. Penelitian ini senada dengan Melati et al. (2021) yang menyatakan fungsi belanja Pendidikan berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Peningkatan pengeluaran akan fungsi Pendidikan akan meningkatkan fasilitas dan akses masyarakat terhadap Pendidikan. Dengan adanya belanja pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya memiliki peluang bekerja meningkat dan akan menurunkan tingkat kemiskinan yang ada.

Fungsi Perlindungan Sosial memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap persentase kemiskinan dengan koefisien sebesar -0.100744 dengan nilai $|t \text{ stat}| = 2.562043 > t \text{ tabel} = 1,96$ dan nilai probabilitas $= 0.0120 < \alpha = 0.05$. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 persen belanja perlindungan sosial akan menurunkan persentase kemiskinan sebesar 0.167223 poin dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini senada dengan penelitian Syamsuri & Bandiyono (2018) yang menyatakan bahwa fungsi perlindungan sosial berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Dengan adanya perlindungan sosial dari negara terhadap masyarakat maka masyarakat menjadi terjamin dalam akses terhadap perlindungan sosial, dan akan mendapatkan akses terhadap kesempatan baik di bidang ekonomi maupun Pendidikan.

Fungsi Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap persentase kemiskinan dengan koefisien sebesar -0.167223 dengan nilai $|t \text{ stat}| = 5.321624 > t \text{ tabel} = 1,96$ dan nilai probabilitas $= 0.0000 < \alpha = 0.05$. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 persen belanja perumahan dan fasilitas umum akan menurunkan persentase kemiskinan sebesar 0.167223 poin dengan

asumsi variabel lain konstan. Hal ini senda dengan penelitian Azwardi (2014) yang menyatakan belanja Perumahan dan

Fungsi Fasilitas Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Dengan dibangunnya akses terhadap perumahan dan fasilitas umum maka akan memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatannya, sehingga akan memunculkan aktivitas ekonomi dan akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Dana Desa memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap persentase kemiskinan dengan koefisien sebesar -0.251958 dengan nilai $|t \text{ stat}| = 6.497456 > t \text{ tabel} = 1,96$ dan nilai probabilitas $= 0.0000 < \alpha = 0.05$. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 persen dana desa akan menurunkan persentase kemiskinan sebesar 0.251958 poin dengan asumsi variabel lain konstan. Penelitian ini senada dengan Azwardi & Sukanto (2014), Oktavia (2019) serta Sunu dan Utama (2019) yang menyatakan apabila pemanfaatan dana desa sesuai dengan peruntukan maka akan dapat berdampak terhadap perekonomian masyarakat dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Kesimpulan dan Saran

Model fixed efek diperoleh sebagai model terbaik berdasarkan pengujian model panel (Chow, LM BP, dan Hausman). Masih ada pelanggaran terhadap asumsi klasik autokorelasi. Model Fixed ditransformasi dengan penambahan efek crosssection white. Hasil yang diperoleh bahwa seluruh variabel independen berpengaruh bersama-sama secara signifikan terhadap persentase kemiskinan. Secara parsial variabel Fungsi Pendidikan, Fungsi Perlindungan Sosial, Perumahan dan Fasilitas Umum dan Dana Desa berpengaruh signifikan negatif terhadap persentase kemiskinan. Dengan peningkatan belanja Fungsi Pendidikan, Fungsi Perlindungan Sosial, Perumahan dan Fasilitas Umum dan Dana Desa akan menurunkan persentase kemiskinan. Di sisi lain belum cukup bukti menyatakan Fungsi Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap persentase kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan kebijakan komprehensif terkait ekonomi makro-sosial agar tingkat kemiskinan Indonesia terus berkurang. Untuk penelitian lebih lanjut, dimungkinkan

untuk menambahkan variabel independen potensial lainnya yang mempengaruhi kemiskinan misalnya pertumbuhan ekonomi, IPM, gini ratio, investasi dan lainnya. Sedangkan dalam pemodelan selanjutnya dapat menggunakan model panel lainnya dengan menggunakan efek random atau efek spasial dalam model panel.

Daftar Pustaka

- Azwardi. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Provinsi Di Indonesia Untuk Fungsi Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan Serta Perumahan Dan Fasilitas Umum Terhadap Penduduk Miskin Tahun 2011-2013. *Journal of Economic & Development*, 12(1), 1-11.
- Azwardi, & Sukanto. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Journal of Economic & Development*, 12(1), 29-41.
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data (Third)*. John Wiley & Sons Ltd.
- BPS. (2021). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2021*.
- BPS. (2022a). *Statistik Keuangan Desa 2021*.
- BPS. (2022b). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2018-2021*.
- Greene, W. H. (2018). *Econometric Analysis (8th ed.)*. Pearson.
- Gujarati, D. (2004). *Basic Econometrics BY Gujarati* (pp. 1-1002). McGraw-Hill Inc.
- Kalpika Sunu, M. K., & Suyana Utama, M. (2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8, 843. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i08.p02>
- Melati, A. M., Sudrajat, & Burhany, D. I. (2021). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 422-430.
- NURAINAH, N. (2019). Analisis Pengaruh Kesempatan Kerja, Belanja Bantuan Sosial Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(1), 63. <https://doi.org/10.20527/jiepv2i1.1155>
- Oktavia, T. (2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan, Pengangguran Dan Tingkat Partisipasi

- Angkatan Kerja Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Pembangunan dan Pemerataan*, 8(3).
- Putri, R. A., Zamzami, & Rahmadi, S. (2021). Pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *10(2)*, 2303–1255.
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105–119. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.170>
- Syamsuri, M. R., & Bandiyono, A. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi Terhadap Peningkatan IPM dan Pengentasan Kemiskinan (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Info Artha*, 2(1), 11–28.
- Walpole, R. E. (2012). *Probability & Statistics for Engineers & Scientists*. Pearson.